



INSPEKTORAT UTAMA

Materi Koordinasi **PERSIAPAN EVALUASI IMPLEMENTASI RB, SAKIP DAN ZI 2019**

Rabu, 26 Februari 2020

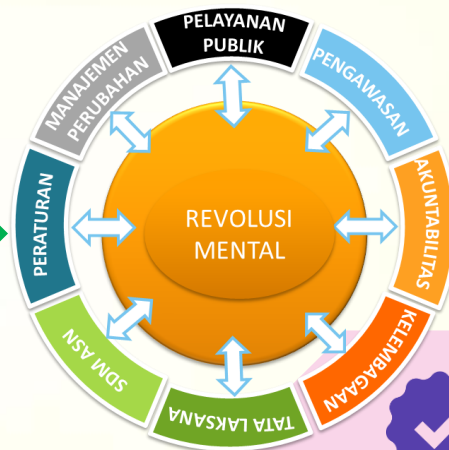
Setyanta Nugraha
Inspektur Utama



MENDORONG PELAKSANAAN

1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS
3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI



Effective



- **Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi**



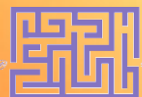
- **Pemerintah yang efektif dan efisien**



- **Pelayanan publik yang baik dan berkualitas**



Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah



Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

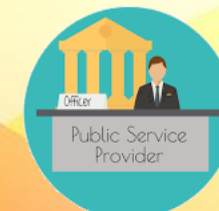


Pelayanan Publik Masih Buruk



EFFICIENCY

2



PUBLIC SERVICE
ACCOUNTABILITY



TRANSPARENCY

EVALUASI

TUJUAN EVALUASI



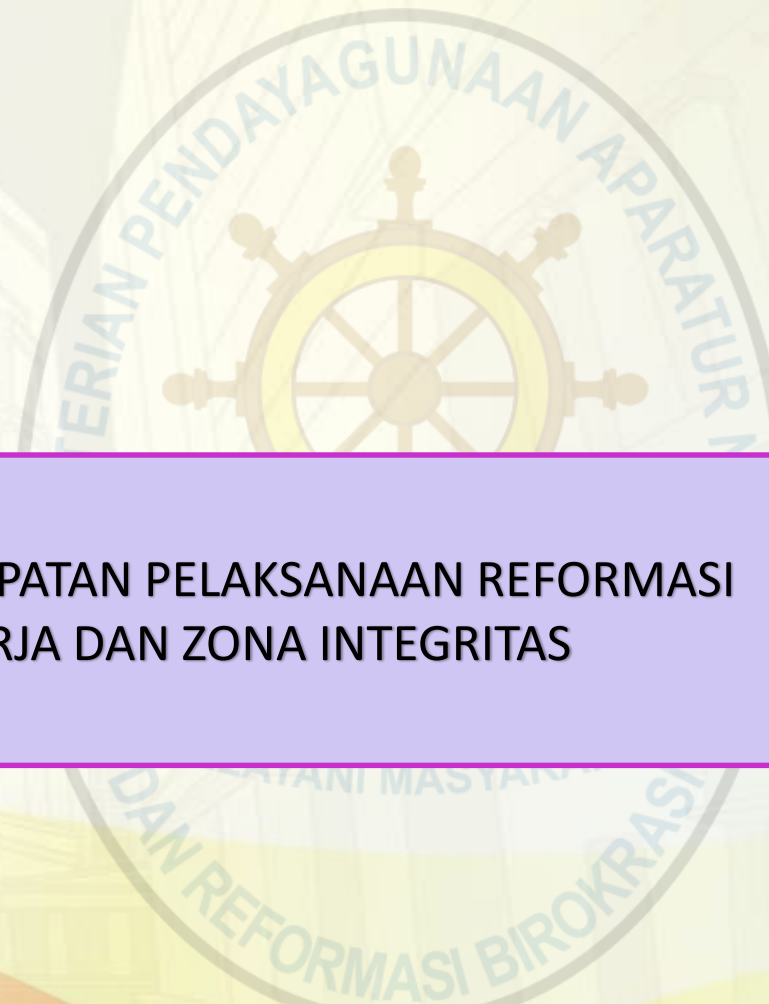
ASSIST

MEMBERIKAN SARAN PERBAIKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN ZONA INTEGRITAS



ASSESS

MENILAI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN **ZONA INTEGRITAS**

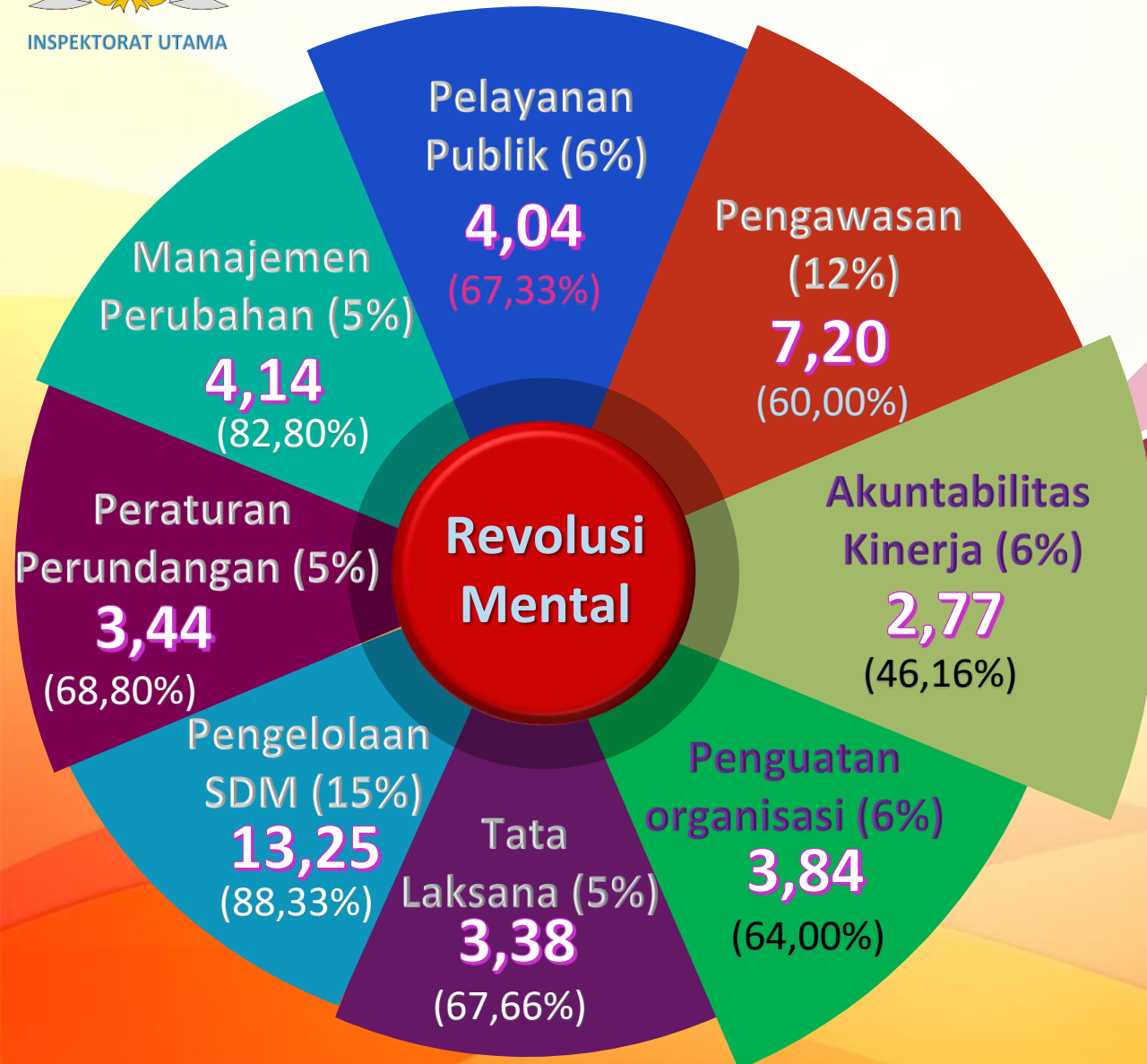




INSPEKTORAT UTAMA

Nilai implementasi REFORMASI BIROKRASI 2018

HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) Hasil : **12,87**



Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) Hasil : **9,23**



Peningkatan Pelayanan Publik (10%) Hasil : **8,55**

Indeks RB 2018

72,71

BB

Sangat Baik

KEBERHASILAN RB TIDAK HANYA DILIHAT DARI **UPAYA** TETAPI JUGA **HASIL** YANG DIRASAKAN OLEH STAKEHOLDER (**DPR-RI, MITRA KERJA, DAN MASYARAKAT**)

HASIL ANTARA PMPRB 2.5

PMPRB 2.5

HASIL
ANTARA
YANG
DIGUNAKAN

Hasil Pengawasan Kearsipan
(penguatan tatalaksana)

61

Penilaian	Unit Kerja	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Pusat Jawaban	Unit Jawaban	Nilai
4. Kualitas Pengelolaan Arsip							
a. Hasil Pengawasan Kearsipan			Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015)	Indeks			

Maturitas SPIP (penguatan pengawasan)

3,185

Penilaian	Unit Kerja	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Pusat Jawaban	Unit Jawaban	Nilai
6. Maturitas SPIP	Ya		Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016)	Indeks	FALSE		#DIV/0!

Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatan pengawasan)

100%
100%

Penilaian	Unit Kerja	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Pusat Jawaban	Unit Jawaban	Nilai
1. Penyampaian Laporan Harat Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Ya						
a. Jumlah yang harus melaporkan							
- Kepala Daerah/Kementerian/Lembaga							
- Eselon III							
- Lainnya							
b. Jumlah yang sudah melaporkan							
2. Penyampaian Laporan Harat Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Ya						
a. Jumlah yang harus melaporkan							
- Jumlah Eselon III							
- Jumlah Eselon IV							
- Jumlah Pegawai Dalam Rangka IV							
b. Jumlah yang sudah melaporkan							

Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatan pengawasan)

3 DC

Penilaian	Unit Kerja	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Pusat Jawaban	Unit Jawaban	Nilai
e. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)			Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015)	Indeks	FALSE		

Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)

Penilaian	Unit Kerja	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Pusat Jawaban	Unit Jawaban	Nilai
c. Penanganan Pengaduan Masyarakat			Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan				
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti							
b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses							
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti							



Capaian 2019

- ❖ Opini WTP 11 Kali (sejak 2008)
- ❖ Indeks Kearsipan 61 (61-75: Cukup)
- ❖ Indeks SPBE 2,49 (1,8-2,6 : Cukup)
- ❖ Maturitas SPIP 3,18 (Target RPJMN 3)
- ❖ LHKPN 100 %
- ❖ LHKASN 100 %
- ❖ Kapabilitas APIP/IACM 3 DC (Target RPJMN 3)
- ❖ Indeks RB 2018 72,71 (BB: Sangat Baik)
- ❖ Indeks LAK 66,22 (B : Baik)

TOGETHER
WE Can Do
MORE



INSPEKTORAT UTAMA

TAHAPAN PMPRB 2020

**TOGETHER
WE CAN**

**Setiap Eselon I
mengisi PMPRB
Online**



- Input PMPRB Level Unit Kerja Eselon I
- Badan Keahlian, Deputi Persidangan, Deputi Administrasi, Ittama

TAHAP I

29 Feb-12 Maret

TAHAP II

13 Maret -24 April 2020

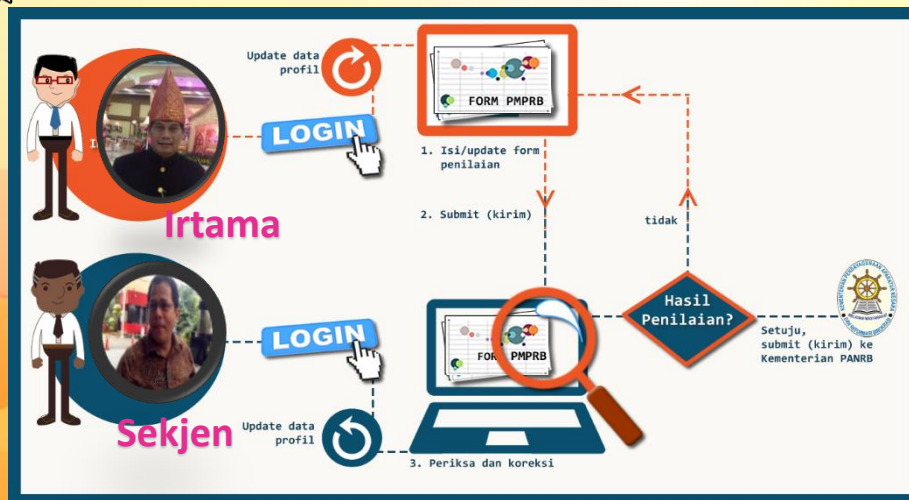
- Input PMPRB Level Unit Organisasi
- Inspektorat Utama

- Reviu Hasil PMPRB oleh Sekjen DPR RI
- Dikirimkan kepada KemenPAN RB

TAHAP III

25 April-29 April 2020

TAHAP IV
Masuk dalam Profil RB Nasional
di Kemen PAN RB





ASESOR DAN ASISTEN ASESOR PMPRB 2020

UNIT ORGANISASI

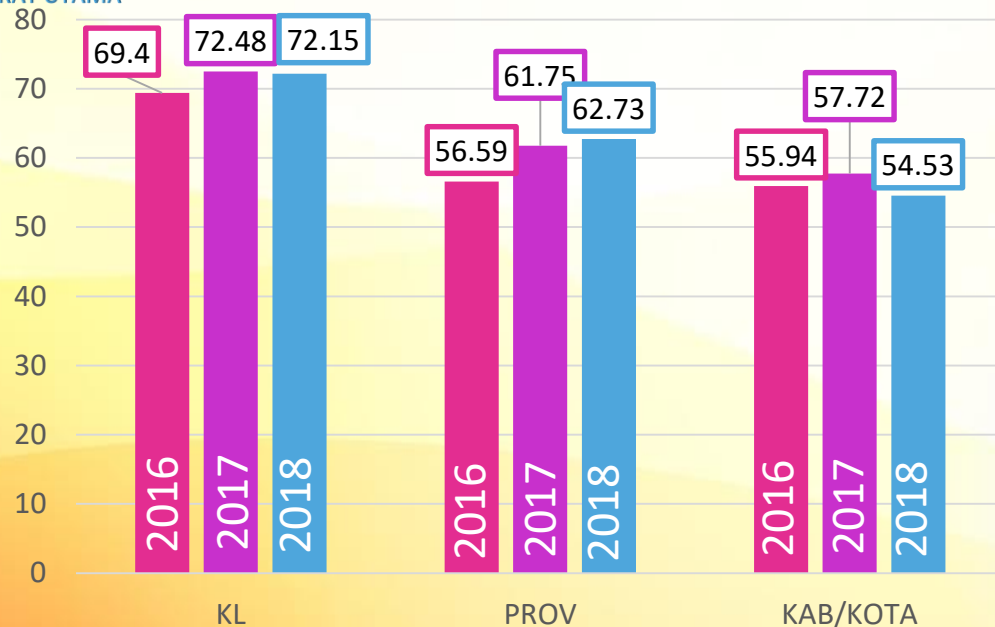
No	Unit Organisasi Eselon I	Aesor	Asisten Aesor	Auditor Pendamping
1	Badan Keahlian	Tanti Sumartini	Susi Daryati	Hasnelson, Nurhariyanti, Fitriyani L, Putri W, Faisal R
2	Deputi Persidangan	Djaka Dwi W	Isnu Purwanto Haryanti	Enden A, M Susanti, Denny R, Mufti F
3	Deputi Administrasi	Rahmat Budiadji	Koko Surya Chairuddin	Deni W, Einstinanto, Ricky S, Fabrina ME, Mikael A, Yulista T.
6	Ittama	Furconi Putri S	Timbang S Aprillia Dessy	Dyah Citra, Afrizal A
7	Pusdatin, Pusdiklat	Nunu Nugraha	Rayahu Yuni S M Chairuddin	Dwi N, HM Morsa, Heru N, Willy ZR
8	Koordinator Aesor	Furconi Putri Sakura (Ketua) Dewi Barliana (Wk. Ketua)		
9	Sekretariat	Ulfa Nurfajar, Afniwati T		



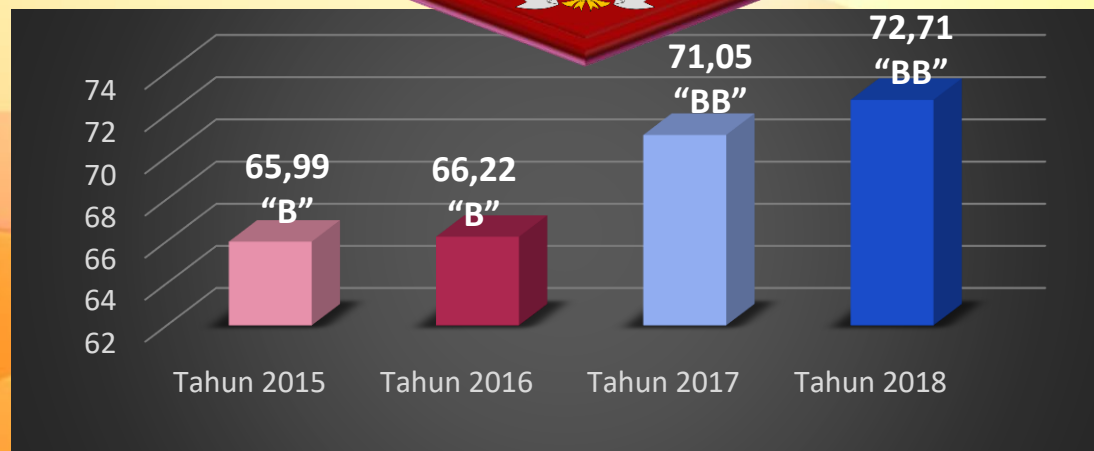
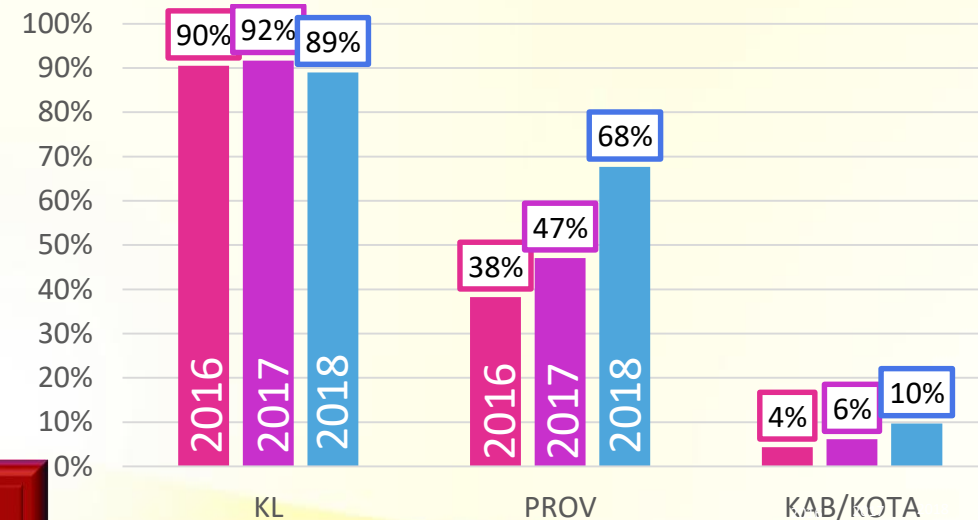
Tren perkembangan Reformasi Birokrasi

NILAI RATA-RATA NASIONAL

INSPEKTORAT UTAMA



IP DENGAN RB BAIK





EFISIENSI BIROKRASI MELALUI SAKIP

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SETJEN DAN BK 2018

Menggambarkan kemampuan instansi dalam:

- Mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran;
- Menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas;
- Menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan.

KATEGORI		EFISIEN
Kategori	Range Nilai	
AA	90-100	↑ BOROS
A	80-90	
BB	70-80	
B	60-70	
CC	50-60	
C	30-50	
D	0-30	

KATEGORI		Kementerian/ Lembaga				Pemerintah Provinsi				Kabupaten / Kota			
Kategori	Range Nilai	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
AA	90-100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A	80-90	4	4	6	5	2	3	4	4	1	2	2	9
BB	70-80	21	27	26	31	7	7	6	6	7	10	30	40
B	60-70	36	37	40	42	8	12	19	18	31	57	139	185
CC	50-60	16	11	7	3	13	10	5	5	172	199	174	162
C	30-50	0	3	3	2	3	2	0	0	239	193	135	97
D	0-30	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	3	5

Nilai Efisiensi 2018



± 35 T
Dari 25 Provinsi



± 30,1 T
Dari 215 Kab/Kota



± 65,1 T
TOTAL



EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. *Re-focusing* (pengurangan) Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya *cross-cutting* program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM) 2020

Merupakan Miniatur Pembangunan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Mandiri

PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA Syarat Pengajuan Zona Integritas

Permenpan
52/2014

2019

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

Dilanjutkan



ROSID II



BKSAP

Dipersiapkan



Puskaji Anggaran



Pusat PUU

Proses Assesment:

1. Biro Renkeu
2. Biro Kepeg n Org
3. Biro Hukum n Dumas
4. Biro Umum
5. Biro P BMN
6. Biro Protokol
7. Pusdatin
8. Puskiklat

Dipersiapkan



Puskiklat



Hukum Dumas

PEMENUHAN

1. Dokumen/ Eviden digital
2. Inovasi, keunggulan
3. Seluruh pegawai paham tusi
4. SOP ditingkatkan
5. Pelayanan Prima
6. PDCA

INTEGRITY



Doing what is right even if it's difficult and no one knows.

ZONA INTEGRITAS

5 Langkah Utama Membangun ZI



KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama



KEMUDAHAN PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitality untuk kepuasan publik (Dewan)



PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT (Dewan)

Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat (Dewan) sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut



MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya



MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat (Dewan)



Banyak yang salah jalan
tapi merasa tenang
karena banyak teman
yang sama-sama salah.

Beraniilah
menjadi BENAR,
meskipun sendirian.

--Baharuddin Lopa--



repro-desain: Abdul Muis Syam

Kurang cerdas dapat diperbaiki
dengan belajar.

Kurang cakap dapat dihilangkan
dengan pengalaman.

Namun tidak jujur
itu sulit diperbaiki

Bung Hatta



merdeka.com



@merdekadotcom



www.facebook.com/MDK.com



@merdekadotcom



**BIASAKAN
YANG BENAR
BUKAN
MEMBENARKAN
YANG BIASA**
[K.H. AHMAD DAHLAN]

terima
KASIH

ittama.dpr.go.id